



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PALU

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RENY A LAMADJIDO**
2. Jabatan : **WAKIL WALIKOTA**
3. NHK : **703139**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.455.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.134 m2/1.134 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 974 m2/974 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.160 m2/1.160 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 485 m2/485 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 540 m2/540 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 632 m2/632 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m2/264 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **851.200.000**

1. MOTOR, HONDA NC11 BF1DA/T Tahun 2014, HADIAH Rp. 9.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 1YD Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, ERTIGA GX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 331.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MAGH10R-BRXLBD 2.0 G HV CVT Tahun 2023,



HASIL SENDIRI Rp. 503.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 300.020.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 565.387.107

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 730.679.343

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.902.286.450

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.902.286.450

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.